

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan penarikan diri AS dari *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017. *Paris Agreement* merupakan kesepakatan iklim yang dibentuk pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, sebagai agenda iklim lanjutan atau pengganti dari berakhirnya *Kyoto Protokol* 1997 yang dibentuk di bawah naungan UNFCCC. Kesepakatan ini dibuat dalam rangka mereduksi gas emisi karbon untuk mengantisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim akibat semakin tingginya temperature bumi akibat tingginya emisi gas karbon terutama dari penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan dalam setiap aktivitas di industri-industri modern. *Paris Agreement* diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia kecuali Nikaragua dan Suriah. Barack Obama meratifikasi pada 12 Desember 2016 di sebagai sebuah terobosan baru AS dalam mendukung agenda iklim global. Namun, pada 1 Juni 2017, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan karena kesepakatan tersebut justru dianggap merugikan perekonomian AS dengan melemahkan daya saing industri-industri AS.

Adanya *gap* yang tinggi antara kalangan konservatif dan kalangan liberal yang diperjelas dengan adanya dua partai utama AS yakni Partai Republik dan Partai Demokrat dalam sejumlah isu termasuk isu perubahan iklim membuat perubahan pola kebijakan AS bisa menjadi sangat signifikan. Arah dan pola kebijakan Trump akan dipengaruhi ortodoksi platform Partai Republik. Platform Republik tentang lingkungan, energi, dan iklim menyebutkan bahwa perubahan iklim bukan ancaman keamanan yang darurat. Mahalnya pembiayaan kebijakan iklim dianggap tidak sepadan dan lebih baik dialokasikan untuk pengembangan teknologi produksi dan ekspor energy sehingga dapat menjaga dominasi AS sebagai eskportir energi terbesar di dunia. Pengembangan sektor energy dan industry bahan bakar fosil ini tidak terlepas

dari kalangan pendukungnya yang sebagian besar berasal dari kalangan profesional dan pengusaha.

Perilaku, sikap, dan pola kebijakan iklim Trump dapat diamati dari pola kebijakan para pendahulunya dari Partai Republik. Pada tahun 1970, Richard Nixon membentuk EPA, mensahkan UU NEPA, *Endangered Species Act*, *Clean Water Act*, dan *Clean Air Act* di mana hal ini telah berubah menjadi masalah bagi Partai Republik kontemporer. Sejak era Ronald Reagan, Partai Republik kontemporer memang menjadi semakin homogen dan konservatif. Jumlah izin pengeboran gas dan minyak di lahan public pada era Reagan juga tercatat meningkat. Pada era George H W Bush, ia benar-benar menolak kebijakan iklim melalui reduksi dan stabilisasi gas emisi karbon atau gas rumah kaca dalam bentuk apapun. Meskipun ia mendukung beberapa kebijakan lingkungan karena aspirasi dan dorongan masyarakat ditambah adanya dominasi Demokrat di Senat, tidak dapat dipungkiri bahwa pola kebijakan di bawah Bush pun lebih berfokus pada pengembangan minyak dan gas daripada keanekaragaman hayati. Memasuki era Bill Clinton (asal Partai Demokrat), pergerakan Partai Republik menjadi lebih agresif di bawah pengaruh Newt Gingrich yang memegang kekuasaan di *House of Representatives AS* pada masanya didukung oleh kalangan pengusaha dan kontraktor. Jadi, penandatanganan Clinton dalam *Kyoto Protokol 1997* tak pernah sampai diratifikasi. Hingga pada era George W Bush, AS keluar dari *Kyoto Protocol 1997* pada tanggal 29 Maret 2001.

Latar belakang Trump yang berasal dari kalangan pengusaha besar dapat mempengaruhi pola kebijakan Trump sehingga lebih mengutamakan peningkatan produksi dan ekspor energi daripada mendukung aksi-aksi iklim. Pada tanggal 1 Juni 2017, Trump mengumumkan bahwa ia akan menarik AS dari Paris Agreement dan menghentikan kontribusi keuangan AS untuk *Paris Agreement*, yang merupakan kesepakatan iklim global merupakan kesepakatan iklim global yang diratifikasi oleh Obama dinilai bukan kesepakatan yang menguntungkan bagi AS di mana kesepakatan tersebut bisa

saja mengancam kedaulatan AS karena mewajibkan AS untuk mematuhi procedural pelaporan terhadap upaya domestik, konsistensi dan transparansi aliran pendanaan iklim yang akan ditinjau secara berkala dan secara tidak langsung menuntut AS mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sedangkan Trump dan kalangan Republik sangat mementingkan sektor energi dan bahan bakar fosil.

Tujuan dan mekanisme *Paris Agreement* juga tidak sesuai dengan platform Partai Republik yang menjadikan pengembangan produksi dan ekspor energi sebagai agenda utama. Terlebih lagi, diferensiasi kewajiban dan tanggung jawab pembiayaan mitigasi negara maju dan negara berkembang yang dikemas dalam kategori negara *Annex 1* dan negara *Non-Annex 1* dianggap tidak adil atau tidak proporsional sehingga justru menguntungkan negara berkembang dengan adanya dukungan finansial, alih teknologi, maupun kapasitas pembangunan dari *Annex 1*, namun mengancam keberlangsungan industri-industri AS dan dominasi ekonomi AS di dunia. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang bisa menjadi salah satu tantangan dan hambatan terhadap keberhasilan upaya negosiasi iklim dalam *Paris Agreement*.

Ancaman dominasi China juga menjadi pertimbangan Trump untuk menarik AS keluar dari kesepakatan. China merupakan negara penyumbang emisi gas karbon terbesar di dunia dengan tingkat ekspansi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, negara penyumbang sekaligus pengguna bahan bakar terbesar di dunia. Meskipun tingkat ekonominya tinggi, China masih tergolong negara berkembang karena penduduk berpenghasilan sangat rendah masih tinggi sehingga China memiliki kewajiban yang lebih fleksibel sesuai dengan tingkat pembangunan negaranya. Sementara, AS harus menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk memenuhi kewajiban AS sebagai negara *Annex 1* sekaligus negara penghasil emisi karbon terbesar kedua setelah China melalui pemberian dana, alih teknologi, dan membantu

pembangunan kapasitas negara-negara berkembang dan pengembangan sumber daya.

Kepentingan AS dalam pengembangan sektor energi sebagai pemasok energi terbesar di dunia sekaligus negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia akan membuat upaya AS menjadi kurang optimal dengan bergabung dalam *Paris Agreement*. Selain AS akan menjadi lebih kesulitan mempertahankan pasar dan ketergantungan negara lain dengan pasokan bahan bakar fosil AS, hal ini juga memungkinkan China dapat mengungguli dominasi energi AS secara khusus dan pasar perdagangan AS dalam skala yang lebih luas.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca secara umum dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang kajian politik lingkungan global dan menemukan analisa lebih detail mengenai topik yang diangkat, yakni alasan Donald Trump menarik AS dari *Paris Agreement* pada tahun 2017.